

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASKIA CERIA
DALAM PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

OLEH

**ELVIZA
NPM : 231801034**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/8/25

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASKIA CERIA
DALAM PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

ELVIZA

NPM : 231801034

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/8/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Program ASKIA CERIA dalam Penerbitan
Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Nama : Elviza

NPM : 231801034

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Pembimbing II



Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

TELAH DI UJI PADA 11 APRIL 2025

Nama : Elviza
NPM : 231801034



Panitia Penguji Tesis:

Ketua : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si
Sekretaris : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing I : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP
Pembimbing II : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Penguji Tamu : Dr. Syafruddin Ritonga, M.AP

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pangkalan Berandan, April 2025



Elviza

NPM.231801034

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elviza
NPM : 231801034
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Program ASKIA CERIA dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal:

Yang menyatakan



Elviza

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM ASKIA CERIA DALAM PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT

Nama : Elviza
NIM : 231801034
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP
Pembimbing II : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Pemerintah mengupayakan perlindungan dan pengakuan identitas hukum melalui pelayanan administrasi kependudukan, salah satunya dengan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Permendagri No. 2 Tahun 2016. KIA bertujuan meningkatkan pendataan anak, perlindungan hukum, dan akses pelayanan publik. Di Kabupaten Langkat, program ASKIA CERIA (Ayo Segera Miliki Kartu Identitas Anak, Cepat Rasakan Manfaatnya) diluncurkan untuk mempercepat pencapaian target kepemilikan KIA, dengan promosi menarik di layanan kuliner, pendidikan, dan rekreasi. Kepemilikan KIA di Kabupaten Langkat saat ini belum mencapai target nasional, atau ketercapaiannya masih 49,6%. Sehingga, tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program ASKIA CERIA dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang fokus pada pemahaman dan penggambaran fenomena sosial dengan tujuan untuk memberikan deskripsi yang mendetail dan mendalam. Hasil menunjukkan bahwa implementasi ASKIA CERIA dalam penerbitan KIA di Disdukcapil Kabupaten Langkat masih menghadapi tantangan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Upaya perbaikan diperlukan untuk meningkatkan strategi komunikasi, kualitas sumber daya manusia, alokasi anggaran, motivasi pelaksana, serta koordinasi lintas tingkat dan fleksibilitas prosedur agar program dapat berjalan lebih optimal dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Administrasi Kependudukan, Implementasi Program, Kartu Identitas Anak*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE ASKIA CERIA PROGRAM IN ISSUING CHILDREN'S IDENTITY CARDS AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE OF LANGKAT DISTRICT

Name : Elviza
NIM : 231801034
Study Program : Magister Administrasi Publik
Adviser I : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP
Adviser II : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

The government seeks to protect and recognize legal identity through population administration services, one of which is by issuing Child Identity Cards (KIA) based on Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2016. KIA aims to improve child data collection, legal protection, and access to public services. In Langkat Regency, the ASKIA CERIA (Come on, Get a Child Identity Card, Quickly Feel the Benefits) innovation was launched to accelerate the achievement of KIA ownership targets, with attractive promotions in culinary, education and recreation services. Currently, KIA ownership in Langkat Regency has not reached the national target, or achievement is still 49.6%. So, the aim of this research is to analyze the implementation of the ASKIA CERIA innovation program in issuing Child Identity Cards (KIA) at the Langkat Regency Population and Civil Registration Service in terms of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses a qualitative descriptive approach which focuses on understanding and describing social phenomena with the aim of providing detailed and in-depth descriptions. The results show that the implementation of ASKIA CERIA in issuing KIA at the Langkat Regency Dukcapil Office still faces challenges in the aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Improvement efforts are needed to improve communication strategies, quality of human resources, budget allocation, implementer motivation, as well as cross-level coordination and procedural flexibility so that the program can run more optimally and the benefits are felt by the community.

Keywords: *Population Administration, Program Implementation, Child Identity Cards*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal Tesis yang berjudul “Implementasi Program ASKIA CERIA dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat”.

Sholawat dan Salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita, Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Dimana syafaatnya selalu sangat kita harapkan di akhir kelak.

Proposal Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) dalam Jenjang Pendidikan S2 Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area. Secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng , M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP dan Ibu Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan
5. Kepada kedua orang tua yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Semoga selalu dalam limpahan Rahmat Allah
6. Kepada suami dan anak yang paling saya banggakan dan saya cintai. Serta Zhafir dan Zherin sebagai penyemangat saya dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga selalu dalam kasih sayang dan lindungan Allah.
7. Seluruh Dosen Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, semoga segala kebaikan yang diberikan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT

8. Serta seluruh rekan rekan seperjuangan pada program studi ilmu Administrasi Publik Angkatan tahun 2023.

Kemudian, penulis juga ingin menyampaikan dengan penuh kerendahan hati serta kesadaran diri, bahwa dalam penyusunan Tesis ini memiliki isi yang jauh dari kata baik. Oleh karenanya, penulis sangat merasa terbuka bagi pihak manapun yang ingin memberikan saran. Semoga penyusunan tesis ini dapat dijadikan bacaan yang bermanfaat bagi semua pihak.

Pangkalan Berendan, April 2025



Elviza
NPM.231801034

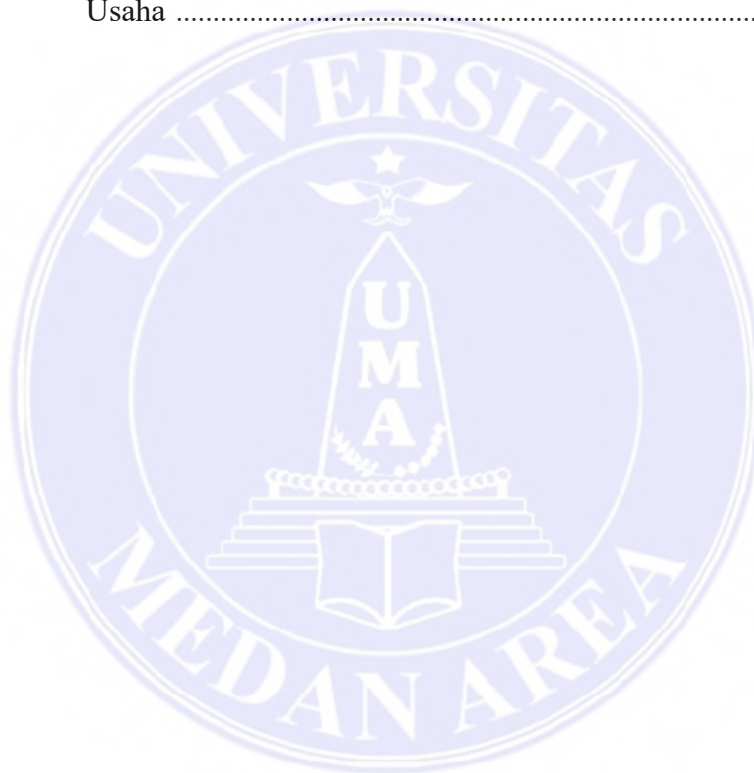
DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kebijakan Publik	8
2.1.1 Defenisi Kebijakan Publik	8
2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik	9
2.2 Implementasi Kebijakan dengan Teori Edwards	10
2.2.1 Komunikasi	11
2.2.2 Sumber Daya	13
2.2.3 Disposisi	14
2.2.4 Struktur Birokrasi	16
2.3 Implementasi Kebijakan dengan Model Matland.....	17
2.3.1 Ambiguitas	18
2.3.2 Konflik	18
2.4 Implementasi Kebijakan dengan Teori Sabatier dan Mazmanian	19
2.4.1 Karakteristik Kebijakan	19
2.4.2 Faktor Instusional	21
2.4.3 Kondisi Eksternal	20
2.5 Penelitian Terdahulu	23
2.6 Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	39
3.2 Jenis dan Objek Penelitian.....	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	39

3.1	Teknik Analisis Data	41
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	46
4.2	Penerbitan KIA di Disdukcapil Kabupaten Langkat	47
4.3	Program ASKIA CERIA dalam Penerbitan KIA	50
4.4	Analisis Implementasi Kebijakan ASKIA CERIA dalam Penerbitan KIA di Kabupaten Langkat	53
4.4.1	Komunikasi	54
4.4.1.1	Transmisi	54
4.4.1.2	Kejelasan	57
4.4.1.3	Konsistensi	59
4.4.2	Sumber Daya	62
4.4.2.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	62
4.4.2.2	Fasilitas	65
4.4.2.3	Anggaran	67
4.4.3	Disposisi	69
4.4.3.1	Penerimaan Kebijakan	70
4.4.3.2	Motivasi	72
4.4.3.3	Komitmen	74
4.4.4	Struktur Birokrasi	77
4.4.4.1	Struktur Hierarki	77
4.4.4.2	Prosedur dan Standar Operasional	80
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Saran	84
	DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	34
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Disdukcapil Kab. Langkat.....	49
Gambar 4.2. Kartu Identitas Anak (KIA).....	50
Gambar 4.3. Sosial Media Disdukcapil Langkat.....	56
Gambar 4.4. Kegiatan Sosialisasi Program ASKIA CERIA	56
Gambar 4.5. Fasilitas Komputer dan Printer KIA.....	67
Gambar 4.6. Masyarakat Pengguna KIA dan FGD dengan Pelaku Usaha	72



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Persentase yang Memiliki KIA di Kab. Langkat.....	2
Tabel 2.1. <i>Review</i> Penelitian Terdahulu	23



LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. SK Bupati Langkat	90
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laju pertumbuhan yang terus meningkat, telah menjadi perhatian pemerintah dalam memberikan tanggung jawab berupa perlindungan serta pengakuan atas identitas dan hukum bagi setiap warga negaranya. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik yang diharapkan dapat diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia dan menjamin bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama terhadap pelayanan publik dalam rangka administrasi kependudukan. Khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kependudukan guna meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib memiliki SIM. memiliki nomor identifikasi demografi (NIK) seumur hidup, yang harus dicantumkan dalam semua dokumen demografi (Ningtyas & Umiyati, 2023).

Tahun 2016 lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Tujuan penciptaan KIA bagi anak-anak dalam Jurnal Administrasi Hukum dan Pemerintahan adalah untuk memperbaiki pengumpulan data administrasi anak, memberikan perlindungan hukum, dan menyediakan layanan publik demi

memenuhi hak terbaik anak. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pengakuan di ranah hukum, jaminan serta perlindungan hukum, serta memastikan bahwa anak-anak menerima perlakuan yang setara dan adil di hadapan hukum (Djatnika, 2023).

Manfaat lain dari KIA dapat dijadikan sebagai pendaftaran untuk masuk sekolah dan rumah sakit hingga kebutuhan berbagai surat dan keperluan lain. Serta dapat memberikan keringanan kepada anak untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kerjasama yang sudah dirintis dengan pihak ketiga, baik dalam bidang kuliner, pendidikan, tempat rekreasi, olahraga, perbankan, dan lain sebagainya.

Pembuatan KIA telah dipermudah oleh pemerintah yaitu dengan jemput bola ke sekolah-sekolah, Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Langkat. Berdasarkan data terakhir tahun 2021 hingga 2023 jumlah pendaftar KIA seperti yang terlampir pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Persentase yang Memiliki KIA di Kab. Langkat

Tahun	Jumlah Anak Usia 0 – 16 Tahun	Cetak KIA	Persentase jumlah anak yang Cetak KIA
2021	309.082	119.833	38,77 %
2022	303.166	140.955	46,49 %
2023	311.327	154.431	49,60 %

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah pendaftar KIA terus meningkat, namun belum mencapai angka 100% atau secara keseluruhan anak yang berusia 0 sampai 16 tahun. Oleh karena itu, Disdukcapil Kabupaten Langkat membuat inovasi pelayanan guna mempercepat pencapaian target yang

sudah direncanakan diantaranya yaitu program ASKIA CERIA (Ayo Segera miliki Kartu Identitas Anak, Cepat Rasakan manfaatnya) dengan tujuan tersosialisasinya pemanfaatan KIA melalui kemudahan (promo menarik) dalam sarana layanan umum di bidang kuliner maupun sarana belajar serta bermain bagi anak.

Dalam upaya yang dilakukan ini, persentase jumlah pendaftar meningkat sebesar 3,11% . Namun, kenaikan ini belum memenuhi target Nasional Ditjen Dukcapil tahun 2024 yaitu sebesar 60% atau dalam kata lain anak-anak pada wilayah kabupaten langkat masih banyak yang belum mempunyai KIA. Salah satu visi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) adalah kementerian dalam negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa. Tentunya hal tersebut menjadi fokus pemerintah Kabupaten Langkat untuk meningkatkan dan memperbaiki kebijakan yang sudah dijalankan selama ini.

Peran kependudukan adalah elemen penting dalam pelaksanaan pemerintahan, karena pelayanan untuk kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan hanya bisa dilakukan secara efektif jika didukung oleh sistem administrasi kependudukan yang komprehensif (Hasibuan et al., 2022). Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan semua pihak, baik penyelenggara pelayanan maupun masyarakat yang dilayani (Jamaluddin, 2016).

Penelitian terdahulu terkait inovasi pelayanan dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Cilacap dilakukan oleh peneliti (Djatinika, 2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan penerbitan kartu identitas anak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang meliputi pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lima aspek, yaitu kelebihan relatif, relevansi, kompleksitas, kemungkinan uji coba, dan kemudahan yang terlihat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap berjalan dengan baik, namun masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap berupaya untuk menjalin kemitraan dan menciptakan inovasi baru, serta meningkatkan dan merawat fasilitas yang ada, disertai dengan melakukan sosialisasi yang menyeluruh.

juga melakukan sebuah studi yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan dalam studi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sudah cukup baik, meskipun ada beberapa kelemahan pada aspek kepastian kebijakan, pelaksanaannya, dan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang mendukung penerapan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas tersebut, seperti fasilitas yang ada

dan kerjasama dengan pihak ketiga, sementara faktor penghambatnya meliputi kegiatan sosialisasi, regulasi KIA, dukungan dari sektor lain, serta keterlibatan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Alya, 2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan Program “Pelana Sidian” oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penertiban Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bireuen sudah berjalan dengan baik, tetapi belum mencapai potensi maksimalnya. Ketidakoptimalan ini disebabkan oleh beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu ketiadaan regulasi daerah yang mengatur Program “Pelana Sidian”, fasilitas dan infrastruktur yang masih kurang memadai untuk pelaksanaan program tersebut, anggaran yang terbatas yang hanya bergantung pada APBD Kabupaten Bireuen, serta penggunaan dan manfaat Kartu Identitas Anak yang dirasakan masyarakat belum memberikan nilai yang cukup bagi anak-anak mereka.

Ramdhani, (2017) menyusun sebuah artikel dengan tujuan untuk menjadi referensi utama dari berbagai sumber dan penelitian yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik, yang juga memuat pemikiran penulis tentang tema yang dibahas. Pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk: wewenang, sumber daya, komunikasi, dan sikap. Dimensi yang dapat diterapkan untuk menilai pelaksanaan kebijakan publik meliputi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Di sisi lain, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi: evaluasi sebelum pelaksanaan, selama pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan kebijakan publik. Dalam upaya melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan publik, dapat dilakukan kebijakan diskresi selama tidak bertentangan dengan norma dan

peraturan yang sedang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya serta dalam rangka menilai implementasi program ASKIA CERIA dan memaksimalkan pelayanan publik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis program yang sudah dijalankan saat ini dalam penerbitan kartu identitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Langkat yaitu ASKIA CERIA (Ayo Segera miliki Kartu Identitas Anak, Cepat Rasakan manfaatnya) yang ditinjau dari aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Serta harapan penelitian ini dapat membantu Dukcapil Kabupaten Langkat dalam menjalankan penerbitan kartu identitas anak dari kerjasama kepada pelaku usaha yang telah ada selama ini.

1.2. Rumusan Masalah

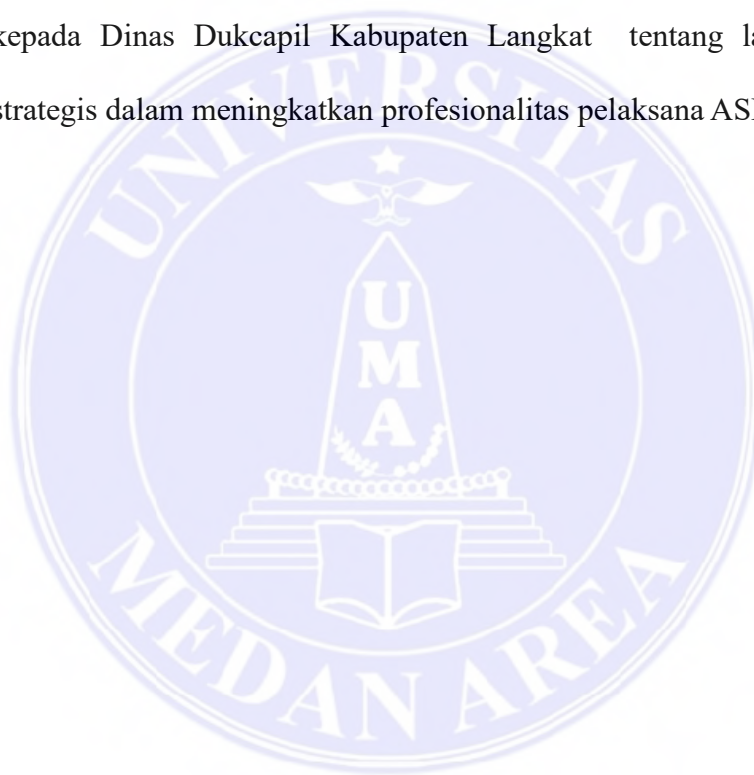
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi program ASKIA CERIA dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program ASKIA CERIA dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi bagi Disdukcapil Langkat untuk meningkatkan kualitas dalam mengimplementasikan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui ASKIA CERIA.
2. Manfaat akademis yang diharapkan adalah menambah informasi dan pengetahuan, khususnya kebijakan publik dan pelayanan publik terhadap permasalahan profesionalisme aparatur pemerintahan.
3. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Langkat tentang langkah-langkah strategis dalam meningkatkan profesionalitas pelaksana ASKIA CERIA.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

2.1.1. Defenisi Kebijakan Publik

Dalam pemahaman yang umum, banyak pakar telah memberikan definisi. Menurut Thomas R. Dye yang dirujuk dalam (Anggara, 2014) kebijakan publik adalah suatu tindakan dari pihak pemerintah, baik itu tindakan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan itu. Saat kebijakan tersebut diimplementasikan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan alasan dan manfaat yang harus diperhatikan untuk masyarakat. Sejalan dengan pendapat James E. Anderson yang juga dikutip dalam (Anggara, 2014), kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai kebijakan yang dirancang oleh pejabat pemerintah, yang berfungsi sebagai panduan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Penjelasan ini menekankan bagaimana pemerintah memandang suatu masalah yang ada di area kebijakannya, sehingga keputusan diambil untuk mencoba menyelesaikannya dengan pembuatan kebijakan (Dr. Sobirin, 2023)

Kebijakan publik berfungsi sebagai alat bagi tindakan pemerintah, dengan tujuan mencapai kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai konstituen. Kebijakan ini dianggap sah dan legal karena dirumuskan dan diterapkan oleh pemerintah sebagai lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Proses pembuatan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari teori, model, hipotesis, dan hubungan sebab-akibat, serta mempertimbangkan asumsi-asumsi mengenai perilaku masyarakat.

2.1.2. Tahapan Kebijakan Publik

Untuk merumuskan atau menyusun sebuah kebijakan, lembaga pemerintah menjalani serangkaian proses tertentu. Menurut Dunn, (2000) yang dikutip oleh Sahya Anggara, berikut adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

- a. Penyusunan Agenda, pada tahap ini dilakukan upaya untuk merumuskan permasalahan berdasarkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Proses ini juga mencakup identifikasi asumsi-asumsi tersembunyi, analisis penyebab munculnya masalah, serta perancangan peluang yang dapat dihasilkan oleh kebijakan tersebut.
- b. Formulasi Kebijakan, tahap ini melibatkan evaluasi dan pemilihan informasi yang relevan untuk mendukung kebijakan, dengan mempertimbangkan potensi masalah yang mungkin muncul di masa depan. Selain itu, tahap ini juga mencakup analisis dampak dari kebijakan yang direncanakan serta identifikasi hambatan yang mungkin dihadapi.
- c. Adopsi Kebijakan, tahap ini berfokus pada analisis manfaat dan biaya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan, sekaligus memperkirakan dampak yang mungkin terjadi di masa mendatang. Informasi ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko dan ketidakpastian yang mungkin timbul serta menentukan tanggung jawab administratif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Implementasi kebijakan atau tahap pemantauan, tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan

sebelumnya. Selain itu, proses ini juga membantu mengidentifikasi kendala yang muncul selama implementasi serta dampak yang tidak terduga dari kebijakan tersebut.

- e. Penilaian Kebijakan atau evaluasi, tahap evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kinerja yang diharapkan dengan hasil yang dicapai dari kebijakan. Proses ini juga memungkinkan munculnya kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan tersebut, serta dapat mengarah pada perumusan ulang masalah sebagai langkah awal untuk memperbaiki kebijakan.

2.2. Implementasi Kebijakan dengan Teori George C. Edwards III

Implementasi kebijakan merupakan proses penerapan kebijakan yang telah dirumuskan agar dapat dijalankan secara efektif. Proses ini mencerminkan pelaksanaan peraturan atau undang-undang dengan melibatkan kerja sama berbagai pihak untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan secara optimal. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi mencakup: (1) pembuat kebijakan (*the center*), (2) petugas pelaksana di lapangan (*the periphery*), serta (3) individu atau kelompok di luar pemerintah yang menjadi target kebijakan (*target group*).

Dari sudut pandang pembuat kebijakan, implementasi kebijakan bertujuan memastikan pejabat dan lembaga pemerintah pusat dapat mendorong pejabat atau lembaga daerah memberikan pelayanan yang optimal dan memengaruhi perubahan perilaku masyarakat. Jika program tidak berjalan sesuai harapan, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk memberikan sanksi hukum kepada pejabat daerah yang bertanggung jawab atau meninjau kembali kebijakan

untuk dilakukan revisi atau perumusan ulang.

Dari perspektif pejabat pelaksana lapangan, implementasi kebijakan bergantung pada tindakan dan kinerja pejabat serta instansi terkait untuk memastikan keberhasilan kebijakan sekaligus mengatasi masalah yang muncul. Sementara itu, dari sudut pandang kelompok sasaran, implementasi dianggap berhasil ketika kelompok tersebut secara langsung merasakan dampak positif dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

George C. Edwards III, sebagaimana dikutip oleh (Winarno, 2014), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dalam kebijakan publik yang berfokus pada pengaruh dan dampaknya terhadap masyarakat. Kebijakan dapat mengalami kegagalan meskipun telah dijalankan jika tidak tepat sasaran. Bahkan, kebijakan yang dirumuskan dan direncanakan dengan baik pun tetap berisiko gagal apabila implementasinya tidak dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, perumusan dan implementasi kebijakan harus dilakukan secara tepat agar tujuan dan sasaran yang diinginkan tercapai, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan sukses.

Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi selama proses tersebut, George C. Edwards III menguraikan empat faktor atau variabel yang dapat digunakan sebagai penjelasan (Edwards, 1980).

2.2.1. Komunikasi

Komunikasi adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan, yang harus disampaikan secara jelas dan menyeluruh kepada sasaran dan pelaksana

kebijakan agar sesuai dengan harapan pembuat kebijakan dan meminimalkan masalah. Edwards, dikutip oleh Budi Winarno (2016:156), membagi komunikasi menjadi tiga aspek: transmisi, kejelasan, dan konsistensi, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Transmisi mengacu pada proses penyampaian keputusan yang telah dibuat oleh pejabat pembuat kebijakan kepada para pelaksana kebijakan. Dalam praktiknya, sering kali terjadi pengabaian terhadap keputusan yang telah dikeluarkan, yang kemudian dapat menimbulkan kesalahpahaman. Beberapa hambatan dalam proses transmisi ini meliputi adanya perbedaan pandangan antara pelaksana kebijakan dan pembuat keputusan, informasi yang harus melewati banyak tingkatan hierarki, serta persepsi selektif dari pelaksana yang menyebabkan pemahaman informasi menjadi tidak utuh.
- b. Kejelasan merujuk pada sejauh mana komunikasi yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan dapat dipahami dengan baik. Ketidakjelasan dalam komunikasi dapat memicu munculnya persepsi yang keliru dan kesalahpahaman yang berpotensi bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketidakjelasan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kebijakan yang terlalu rumit, tujuan kebijakan yang belum dirumuskan dengan jelas, adanya masalah dalam kebijakan itu sendiri, atau pelaksana kebijakan yang sengaja menghindari tanggung jawab, serta faktor-faktor lainnya.
- c. Konsistensi dalam kebijakan pemerintah mengacu pada keselarasan dan kesinambungan dalam perintah, arahan, atau keputusan yang diberikan

oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana. Ketika pemerintah tidak konsisten, hal ini dapat menciptakan kebingungan di tingkat pelaksana, karena arahan yang berubah-ubah atau bertentangan dapat memicu penafsiran yang beragam. Akibatnya, tindakan pelaksana kebijakan menjadi tidak seragam, kurang tegas, atau bahkan menyimpang dari tujuan awal kebijakan. Konsistensi sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana, menghindari kontradiksi dalam implementasi, dan membangun kepercayaan antara pembuat kebijakan, pelaksana, serta masyarakat. Jika kebijakan yang diinstruksikan berubah-ubah tanpa alasan yang jelas atau tanpa komunikasi yang baik, hal ini tidak hanya memengaruhi efektivitas kebijakan tetapi juga dapat merusak kredibilitas pemerintah di mata publik dan pelaksana kebijakan.

2.2.2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan mengacu pada faktor-faktor yang mendukung agar kebijakan dapat dijalankan dengan efektif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang setiap sumber daya yang disebutkan:

- a. Staf yang kompeten dan memiliki keahlian: Implementasi kebijakan membutuhkan individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tepat untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Staf yang terlatih dan berkompeten akan lebih efektif dalam menjalankan kebijakan dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul.
- b. Informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan data ketaatan personel:

Agar kebijakan dapat diterapkan dengan baik, penting untuk memiliki sistem informasi yang dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Data terkait pelaksanaan dan ketaatan terhadap peraturan oleh staf atau pelaksana kebijakan sangat diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan.

- c. Wewenang pelaksana kebijakan: Setiap kebijakan membutuhkan pelaksana yang memiliki wewenang yang jelas untuk mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan. Wewenang ini bisa berupa hak untuk mengeluarkan perintah, menarik dana, menyediakan dana dan staf, membeli barang dan jasa, atau memungut pajak. Wewenang yang tepat dan jelas akan memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan efisien.
- d. Fasilitas fisik seperti ruang kantor, peralatan, teknologi, dan infrastruktur lainnya juga penting untuk mendukung staf dalam melaksanakan kebijakan. Tanpa fasilitas yang memadai, pelaksana kebijakan mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas mereka dengan efektif.

2.2.3. Disposisi

Disposisi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan sifat dan karakteristik pelaku kebijakan yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

1. Disposisi sebagai karakteristik pelaku kebijakan: Disposisi merujuk pada sikap, karakter, dan komitmen yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang dijalankan. Pelaksana yang memiliki disposisi

yang baik, seperti komitmen terhadap aturan, kejujuran, dan sikap demokratis, akan lebih mendukung keberhasilan kebijakan. Hal ini karena mereka cenderung bekerja dengan integritas dan berfokus pada tujuan kebijakan, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok.

2. Pengaruh disposisi terhadap implementasi kebijakan: Sikap dan perilaku pelaksana kebijakan mempengaruhi sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Jika pelaksana kebijakan memiliki sikap yang positif dan sesuai dengan tujuan kebijakan, mereka akan lebih cenderung melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika pelaksana kebijakan tidak memiliki disposisi yang tepat, seperti kurangnya komitmen atau adanya kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kebijakan, hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Dukungan dan pertentangan dalam implementasi kebijakan: Agar kebijakan dapat berjalan efektif, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan, sangat penting. Namun, apabila terdapat perbedaan pandangan atau kepentingan pribadi atau kelompok di antara pelaksana kebijakan, ini dapat menyebabkan pertentangan yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Disposisi yang buruk atau ketidakacuhan dari pelaksana kebijakan dapat menciptakan hambatan dalam implementasi, karena pelaksana tidak menjalankan kebijakan dengan sepenuh hati atau bahkan bertindak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, disposisi pelaksana kebijakan memiliki dampak besar

terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Jika pelaksana memiliki disposisi yang mendukung, kebijakan cenderung akan dilaksanakan dengan lebih efektif. Sebaliknya, disposisi yang tidak mendukung dapat menimbulkan konflik atau ketidakacuhan yang menghambat implementasi kebijakan.

2.2.4. Struktur Birokrasi

Birokrasi dalam implementasi kebijakan mengacu pada peran dan struktur yang ada dalam sistem pemerintahan atau organisasi swasta yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. Dua karakteristik dari birokrasi menurut Edwards dalam Budi Winarno (2016:176) yaitu:

- a. Prosedur ukuran kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP), yaitu sebuah prosedur atau pedoman standar yang digunakan oleh pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas mereka. SOP bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan keteraturan dalam tindakan yang diambil oleh para pejabat atau pelaksana kebijakan. Dengan adanya SOP, setiap tindakan yang diambil oleh pelaksana kebijakan dapat disamakan, meskipun pelaksana tersebut bekerja di area yang luas atau berbeda. Hal ini memberikan fleksibilitas karena prosedur yang baku memungkinkan setiap pelaksana kebijakan untuk bertindak sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. SOP memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara konsisten di seluruh tingkat birokrasi. Namun, meskipun SOP memberikan keseragaman, terkadang prosedur yang terlalu ketat atau rumit dapat memperlambat implementasi kebijakan, karena para pelaksana harus mengikuti setiap langkah secara rinci, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan situasi yang berkembang di lapangan.

- b. Fragmentasi, yaitu Fragmentasi mengacu pada pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan yang tersebar di berbagai unit atau bagian dalam birokrasi. Hal ini seringkali disertai dengan desentralisasi kekuasaan, di mana kekuasaan atau keputusan kebijakan tidak terpusat pada satu titik, tetapi tersebar di berbagai tingkat birokrasi. Fragmentasi dan desentralisasi dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam implementasi kebijakan, karena keputusan dapat diambil lebih cepat oleh pihak yang lebih dekat dengan situasi lapangan. Ini juga memungkinkan berbagai unit untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi lokal yang berbeda. Namun, fragmentasi juga dapat melemahkan pengawasan terhadap kebijakan, karena dengan banyaknya pihak yang terlibat, kontrol dan koordinasi antar unit menjadi lebih sulit. Prosedur pembuatan kebijakan yang melibatkan banyak pihak ini dapat menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Selain itu, adanya tekanan dari pihak eksternal seperti pejabat legislatif, eksekutif, kelompok kepentingan, atau konstitusi negara dapat mempengaruhi struktur birokrasi dan memperburuk kompleksitas pembuatan kebijakan.

2.3. Implementasi Kebijakan dengan Model Matland

Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh James Matland dikenal dengan Model *Ambiguity-Conflict* (Model Ambiguitas-Konflik) dalam konteks implementasi kebijakan (Sholeh et al., 2021). Matland mengemukakan bahwa tingkat ambiguitas (ketidakjelasan) dan konflik yang ada dalam kebijakan akan mempengaruhi cara kebijakan tersebut diimplementasikan. Teori ini

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi proses implementasi dan bagaimana kebijakan bisa dihadapi secara berbeda berdasarkan karakteristiknya.

2.3.1. Ambiguitas

Ambiguitas merujuk pada sejauh mana tujuan dan prosedur kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi. Jika kebijakan memiliki tingkat ambiguitas yang tinggi, artinya ada ketidakjelasan dalam tujuan, proses, atau instruksi yang diberikan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam implementasi karena pejabat atau pelaksana kebijakan tidak tahu bagaimana seharusnya kebijakan tersebut diterapkan. Kebijakan yang memiliki tujuan atau instruksi yang tidak jelas atau terbuka untuk interpretasi dapat menyebabkan ketidakpastian di kalangan pelaksana kebijakan. Ini sering terjadi pada kebijakan yang sangat baru, inovatif, atau yang melibatkan masalah kompleks. Sebaliknya, kebijakan yang memiliki tujuan dan prosedur yang jelas dan terdefinisi dengan baik cenderung lebih mudah diimplementasikan, karena para pelaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang harus dilakukan.

2.3.2. Konflik

Konflik merujuk pada sejauh mana terdapat perbedaan kepentingan antara berbagai kelompok atau aktor yang terlibat dalam kebijakan. Konflik dapat muncul antara berbagai level pemerintahan, antara pemerintah dan masyarakat, atau di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Jika terdapat banyak perbedaan pendapat atau kepentingan yang bertentangan antara pihak-pihak yang terlibat, maka implementasi kebijakan akan lebih sulit dilakukan.

Konflik ini bisa bersifat politis, ideologis, atau bahkan ekonomi, yang akan menghambat kesepakatan mengenai cara-cara implementasi yang tepat. Sebaliknya, Kebijakan dengan tingkat konflik yang rendah lebih mudah diimplementasikan, karena tidak ada banyak perbedaan pandangan atau kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat.

2.4. Implementasi Kebijakan dengan Teori Sabatier dan Mazmanian

Teori implementasi kebijakan oleh Sabatier dan Mazmanian pertama kali diperkenalkan dalam artikel mereka berjudul *"The Conditions of Effective Implementation: A Guide to Accomplishing Policy Objectives"* (1980). Dalam teori ini, mereka menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada serangkaian kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Mereka memandang implementasi kebijakan sebagai proses yang linier, dimulai dari perumusan kebijakan di tingkat pusat (top) hingga pelaksanaannya di tingkat lokal (down). Oleh karena itu, pendekatan mereka sering disebut sebagai pendekatan top-down (Kodariah, 2017). Sabatier dan Mazmanian mengidentifikasi tiga kategori utama faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan:

2.4.1. Karakteristik Kebijakan

Karakteristik kebijakan mencakup beberapa aspek penting yang memengaruhi bagaimana kebijakan dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya:

a. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan merupakan elemen mendasar dalam karakteristik

kebijakan. Tujuan kebijakan harus dirumuskan secara spesifik dan dapat diukur agar pelaksana kebijakan memiliki panduan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai. Tujuan yang ambigu atau terlalu luas dapat menyebabkan kebingungan di antara para pelaksana, yang pada akhirnya menghambat efektivitas implementasi. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan yang menetapkan target "meningkatkan kualitas pendidikan" dianggap terlalu umum, sedangkan target seperti "meningkatkan angka kelulusan siswa sebesar 10% dalam tiga tahun" adalah tujuan yang lebih spesifik dan dapat diukur.

b. Validitas Teori yang Mendasari Kebijakan

Kebijakan harus didasarkan pada teori yang valid, yaitu asumsi atau hipotesis yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara tindakan yang diambil dan hasil yang diharapkan. Teori ini membantu pembuat kebijakan merancang intervensi yang efektif. Misalnya, dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, teori yang mendasari mungkin menyatakan bahwa pelatihan keterampilan kerja akan meningkatkan kesempatan kerja dan pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Jika teori ini valid, kebijakan yang dirancang berdasarkan teori tersebut memiliki peluang lebih besar untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Kelengkapan Instrumen Kebijakan

Instrumen kebijakan adalah alat atau mekanisme yang digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan. Instrumen ini dapat berupa regulasi, insentif, sanksi, atau program-program tertentu yang

dirancang untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan. Kelengkapan instrumen kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan memiliki sarana yang memadai untuk mencapai tujuannya. Sebagai contoh, dalam kebijakan pengurangan emisi karbon, instrumen kebijakan dapat mencakup insentif pajak untuk penggunaan energi terbarukan, regulasi yang mengatur batas emisi, dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar peraturan tersebut. Jika instrumen kebijakan tidak lengkap atau tidak efektif, maka tujuan kebijakan mungkin sulit dicapai.

2.4.2. Faktor Institusional

Penekanan pada faktor-faktor institusional dalam teori Sabatier dan Mazmanian merupakan aspek yang sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Faktor-faktor institusional ini berkaitan dengan kapasitas organisasi, mekanisme koordinasi, sumber daya yang tersedia, serta komitmen dari para pelaksana kebijakan. Penjelasan rinci mengenai faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Struktur Administratif

Struktur ini mencakup sistem birokrasi yang mendukung koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan konflik antar lembaga, tumpang tindih tugas, atau bahkan kegagalan implementasi. Sebaliknya, struktur yang efisien memastikan bahwa setiap aktor memahami perannya, tanggung jawabnya, dan cara berinteraksi dengan aktor lain.

b. **Komitmen dari Pelaksana Kebijakan**

Komitmen ini mencakup kesediaan pelaksana untuk bekerja sesuai dengan prosedur, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan menghadapi tantangan yang muncul selama implementasi. Kurangnya komitmen dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya insentif, ketidakjelasan tujuan kebijakan, atau konflik kepentingan.

c. **Mekanisme Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana, sementara evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai. Tanpa monitoring dan evaluasi yang efektif, pelaksanaan kebijakan bisa keluar jalur, dan masalah yang muncul tidak dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.

2.4.3. Kondisi Eksternal

Kondisi ini mencakup faktor-faktor di luar kontrol langsung pembuat kebijakan dan pelaksana, tetapi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.

a. **Dukungan Politik**

Dukungan ini berasal dari berbagai aktor, termasuk pejabat publik, legislator, dan masyarakat umum. Setiap aktor memainkan peran berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memberikan legitimasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan.

b. **Stabilitas Lingkungan Politik, Sosial dan Ekonomi**

Ketidakstabilan dalam salah satu aspek ini dapat menciptakan

hambatan besar bagi pelaksanaan kebijakan. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan akses sekolah di daerah terpencil mungkin terganggu oleh konflik politik atau sosial di wilayah tersebut.

c. **Penerimaan dan Dukungan dari Kelompok Sasaran**

Penerimaan dan dukungan dari kelompok sasaran memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Tanpa dukungan ini, kebijakan mungkin menghadapi hambatan besar di lapangan.

Dukungan politik memberikan legitimasi dan sumber daya yang diperlukan, stabilitas lingkungan memastikan kelancaran pelaksanaan, dan penerimaan serta dukungan kelompok sasaran menjamin kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik di lapangan. Dengan memperhatikan kondisi eksternal ini, pembuat kebijakan dapat mengantisipasi hambatan yang mungkin muncul dan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi kebijakan.

2.5. Penelitian Terdahulu

Review hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. *Review* Penelitian Terdahulu

No	Judul	Author-Tahun	Teori/Variabel	Tujuan	Hasil
1	<i>Concept of George C. Edwards III on Implementation of</i>	(Putra & Khaidir, 2019)	Goerge Edward III yakni komunikasi, sumber	Mengungkap implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang	Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa kendala antara lain sumber daya

	<i>Regional Regulations No. 12 of 2017 Concerning Youth in Granting Youth Service in West Sumatera</i>		daya, disposisi dan struktur birokrasi	kepemudaan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Sumatera Barat serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan	manusia, sarana dan prasarana serta rendahnya pengetahuan dan minat pemuda.
2	<i>The Effect of Communication , Resources, Disposition and Structure of Bureaucracy on Medical Participation of Men's Operations in City of Bandar Lampung (Study of George Edward III Policy Implementation Model)</i>	(Sormin, 2021)	Goerge Edward III yakni komunikasi , sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi	Melihat pengaruh variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap kepesertaan KB MOP di Kota Bandar Lampung.	Secara simultan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keikutsertaan KB MOP di Kota Bandar Lampung dan besaran pengaruh yang diperoleh sebesar 25,1%
3	<i>Policy implementation in the era of accelerating</i>	(Jensen et al., 2018)	Model Konflik-Ambiguitas Matland	Mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi	Analisis menunjukkan bahwa penggunaan organisasi proyek

	<i>projectification : Synthesizing Matland's conflict-ambiguity model and research on temporary organizations</i>			administrasi publik saat 'organisasi proyek' digunakan sebagai bentuk organisasi struktural	memberikan tuntutan khusus pada para pelaku yang terlibat, dan jika tuntutan ini tidak diperhitungkan, terdapat risiko tinggi bahwa proyek yang dirancang untuk membawa perubahan sosial tidak akan menghasilkan dampak yang diharapkan
4	<i>A qualitative exploration of pharmacovigilance policy implementation in Jordan, Oman, and Kuwait using Matland's ambiguity-conflict model</i>	(Garashi et al., 2021)	Model Konflik-Ambiguitas Matland	Mengeksplorasi mekanisme dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan farmakovigilans di negara-negara Arab dengan sistem farmakovigilans yang lebih baik	Faktor-faktor yang mengurangi ambiguitas kebijakan di Yordania dan Oman meliputi: arahan pembuat keputusan kepada pelaksana, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan, pelatihan pelaksana kebijakan selama proses

					implementasi, tujuan dan sarana kebijakan yang digariskan dengan jelas, dan adanya rencana implementasi strategis dengan jadwal yang tepat serta mekanisme pemantauan. Faktor-faktor yang mengurangi konflik kebijakan meliputi: kepatuhan kebijakan terhadap standar yang diakui, kerja sama pembuat keputusan dengan dan dukungan pusat dan mengadopsi pendekatan bertahap untuk implementasi (Yordania).
5	<i>Policy Implementation Model of the Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) in the Sumedang</i>	(Sugiharti, 2008)	Partisipasi masyarakat, pelestarian budaya, sumber daya manusia	Menganalisis implementasi kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) di Kabupaten Sumedang	Kendala utama yang dihadapi antara lain sosialisasi yang belum efektif, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya,

	<i>Regency Government</i>		dan anggaran serta koordinasi antar pemangku kepentingan		keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.
--	---------------------------	--	--	--	--

2.6. Kerangka Berpikir

Menurut (Sugiyono, 2019), Kerangka berpikir adalah struktur konseptual yang berfungsi sebagai panduan untuk penelitian dan pengembangan teori. Kerangka ini mencakup serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait, yang membantu untuk merumuskan dan mengarahkan pemahaman tentang fenomena tertentu.

Penelitian ini berfokus pada implementasi program ASKIA CERIA (Ayo Segera Miliki Kartu Identitas Anak, Cepat Rasakan Manfaatnya) dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KIA, yang memberikan berbagai manfaat seperti akses mudah ke layanan pendidikan, kesehatan, dan perbankan. Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan ini, program ASKIA CERIA mengacu pada kerangka peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016, yang mengatur secara khusus tentang penerbitan dan penggunaan KIA. Hasil wawancara dengan kepala Disdukcapil

Langkat bahwa jumlah pendaftar KIA di Kabupaten Langkat belum maksimal. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali implementasi program ASKIA CERIA yang sudah dijalankan dengan menggunakan landasan teori dari George C. Edwards III.

Terdapat beberapa teori yang mengukur dan menganalisis implementasi kebijakan publik diantaranya, Teori Matland yang membantu memahami bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada konteks politik dan sosial. Selanjutnya teori Sabatier dan Mazmanian yang mengevaluasi penerapan inovasi menggunakan desain sistem dari awal hingga hasil akhir. Kemudian, pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up* yang menekankan pentingnya hierarki, otoritas, dan pengendalian oleh pihak pembuat kebijakan dan ada Teori Edward yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kebijakan publik, termasuk inovasi teknologi, pelayanan publik, atau reformasi birokrasi. Dari beberapa teori implementasi kebijakan tersebut, Teori Edward memudahkan identifikasi kendala utama dalam proses penerbitan KIA, baik dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur birokrasi.

Teori Edwards berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. George C. Edwards III mengemukakan teorinya dalam bukunya *Implementing Public Policy* (1980). Ia mengembangkan kerangka analisis untuk memahami bagaimana kebijakan yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Edwards menekankan bahwa implementasi kebijakan sering kali gagal bukan karena kebijakan itu sendiri buruk, tetapi karena proses implementasi yang tidak berjalan baik. Empat variabel utama teori

Edwards (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) sangat relevan untuk mengukur implementasi program, terutama dalam konteks penerbitan KIA yang melibatkan layanan publik. Sehingga dalam hal ini, Teori Edward menjadi alat ukur yang digunakan dalam menganalisis implementasi ASKIA CERIA dalam penerbitan KIA.

Dalam inovasi penerbitan KIA, penting untuk memastikan bahwa tujuan dan mekanisme program telah dikomunikasikan secara efektif kepada para pelaksana di tingkat pelayanan (Dinas Dukcapil) dan masyarakat. Implementasi program bergantung pada tersedianya sumber daya, seperti staf terlatih, perangkat lunak untuk pengelolaan data, dan anggaran. Selanjutnya komitmen, sikap, dan kesiapan staf Dukcapil untuk mendukung program sangat memengaruhi keberhasilan penerapannya. Sistem kerja yang efisien dan fleksibel dalam birokrasi, seperti prosedur yang tidak berbelit-belit dan adanya standar operasional, mendukung pelaksanaan program. Karena keempat elemen ini mencakup aspek penting dalam penerapan kebijakan berbasis inovasi, teori Edwards memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi keberhasilan program.

Untuk mengoperasionalisasikan teori George C. Edwards III, maka peneliti menyusun definisi dan operasional penelitian yaitu:

1. Aspek Komunikasi

Definisi komunikasi dalam penelitian ini adalah proses penyampaian informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Selanjutnya operasionalisasi

dari aspek ini terdiri dari:

- a. Transmisi, yaitu memastikan bahwa pesan kebijakan, yang mencakup tujuan, instruksi, dan prosedur, dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh semua pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Untuk mengoperasionalkan aspek komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), dengan fokus pada transmisi pesan, maka dipecah ke dalam beberapa langkah praktis yang dapat memastikan pesan kebijakan tersebut diterima dan dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, terutama oleh masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah operasionalnya:

1. Penyusunan pesan yang jelas dan mudah dipahami
Tujuan: Memastikan bahwa pesan mengenai ASKIA CERIA disusun dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.
Tindakan: Menggunakan bahasa yang jelas dalam bentuk brosur, video atau infografis yang mudah diakses dan dipahami.
2. Pemilihan saluran komunikasi yang tepat
Tujuan: Memastikan pesan yang disampaikan melalui saluran komunikasi yang tepat dan dapat menjangkau audiens target dalam hal pembuatan KIA yaitu orang tua.
Tindakan: Menggunakan media sosial seperti *Facebook*, *Instagram* dan *WhatsApp* untuk menyebarkan informasi kepada Masyarakat.

- b. Kejelasan, berarti bahwa instruksi, tujuan, dan prosedur kebijakan yang disampaikan kepada para pelaksana harus diuraikan secara rinci dan tepat, sehingga tidak ada ambiguitas atau ruang untuk interpretasi yang salah. Operasional kejelasan dalam menjalankan program ASKIA CERIA:

1. Penyusunan panduan standar untuk semua pelaksana kebijakan

Tindakan: Membuat panduan operasional untuk pelaksanaan program ASKIA CERIA yang mencakup tujuan program, prosedur penerbitan KIA dan peran masing-masing petugas dalam pelaksanaan program.

- c. Konsistensi, yang berarti bahwa pesan yang ditransmisikan harus konsisten di seluruh tingkat organisasi untuk menghindari kebingungan atau konflik interpretasi. Operasional konsistensi dalam menjalankan program ASKIA CERIA yaitu:

1. Penyampaian Informasi Secara Berulang dan Interaktif

Tindakan: Gunakan pendekatan repetisi informasi melalui berbagai saluran, seperti media sosial, radio, dan kegiatan masyarakat.

Penyampaian informasi yang seragam baik secara lisan maupun tulisan.

2. Aspek Sumber Daya

Defenisi sumberdaya dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Sumber daya ini mencakup berbagai elemen yang mendukung proses implementasi, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Selanjutnya operasionalisasi dari aspek sumberdaya ini adalah:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) atau staff, yaitu ketersediaan staf atau personel yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan kebijakan. Operasional SDM dalam menjalankan program ASKIA CERIA yakni: Penentuan Tanggung Jawab dan Pembagian Peran yang Jelas

Tindakan: Tentukan peran setiap petugas, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa, dalam proses penerbitan KIA.

Indikator SDM: Penilaian oleh atasan langsung mengenai kinerja berdasarkan tugas yang telah dibagi. Pastikan adanya pembagian tugas yang jelas, seperti petugas administrasi untuk verifikasi data, petugas komunikasi untuk sosialisasi kepada Masyarakat dan petugas teknis yang bertanggung jawab atas penerbitan fisik KIA.

- b. Fasilitas dialokasikan untuk mendukung implementasi kebijakan. Fasilitas yang memadai merupakan aspek penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program ASKIA CERIA. Fasilitas ini mencakup infrastruktur, peralatan, dan teknologi yang digunakan untuk mendukung penerbitan KIA. Berikut adalah langkah operasional dan indikator keberhasilan yang dapat diimplementasikan:

1. Ruang Pelayanan di Kantor Dukcapil

Tindakan: Pastikan ketersediaan ruang kerja khusus untuk pelayanan penerbitan KIA di kantor Dukcapil kabupaten dan kecamatan, sediakan fasilitas pendukung seperti meja, kursi, dan ruang tunggu yang nyaman untuk masyarakat.

Indikator fasilitas: Ketersediaan ruang pelayanan khusus di semua lokasi.

2. Penyediaan Peralatan Kerja

Tindakan: Sediakan perangkat keras yang memadai seperti komputer, printer, dan scanner untuk mendukung proses administrasi penerbitan KIA.

Indikator fasilitas: Jumlah perangkat yang tersedia di setiap lokasi (komputer, printer, scanner).

- c. Anggaran merupakan komponen penting untuk mendukung pelaksanaan program ASKIA CERIA. Alokasi anggaran yang efektif dan efisien memungkinkan kelancaran implementasi program, mencakup penyediaan fasilitas, teknologi, pelatihan SDM, hingga kegiatan sosialisasi. Berikut adalah langkah operasional untuk mengelola aspek anggaran:

1. Perencanaan Anggaran

Tindakan: Identifikasi kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan dalam pelaksanaan ASKIA CERIA, seperti penyediaan fasilitas, operasional layanan, dan sosialisasi. Buat rencana anggaran rinci berdasarkan prioritas, mencakup: Pembelian alat (printer kartu, komputer, kendaraan operasional), Biaya pelatihan SDM dan Biaya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

Indikator operasional: Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran tahunan, kesesuaian rencana anggaran dengan kebutuhan program.

2. Pengalokasian Anggaran

Tindakan: Tetapkan alokasi anggaran ke beberapa kategori, seperti: pelayanan langsung, layanan jemout bola, sosialisasi dan komunikasi dan pengembangan SDM.

Indikator operasional: Tersedianya rincian anggaran untuk setiap kegiatan.

3. Aspek Disposisi

Disposisi dalam konteks implementasi kebijakan menurut George C. Edwards merujuk pada sikap, niat, dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Selanjutnya operasionalisasi dari aspek disposisi ini adalah:

- a. Penerimaan Kebijakan, yaitu disposisi yang baik mencerminkan penerimaan terhadap kebijakan oleh para pelaksana. Jika pelaksana mendukung dan setuju dengan kebijakan tersebut, mereka lebih mungkin untuk melaksanakannya dengan baik. Berikut adalah langkah operasional untuk memastikan penerimaan kebijakan yang optimal:
 1. Sosialisasi Internal Kebijakan

Tindakan: Lakukan sosialisasi kebijakan ASKIA CERIA kepada seluruh pihak yang terlibat, seperti kepala dinas, koordinator kecamatan, petugas lapangan, dan pemangku kepentingan lainnya serta menjelaskan tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan program secara rinci.

Indikator Operasional: Jumlah sesi sosialisasi yang dilakukan dan tingkat pemahaman peserta sosialisasi berdasarkan wawancara

- b. Motivasi dalam aspek disposisi merujuk pada dorongan atau insentif, baik intrinsik maupun ekstrinsik, yang memengaruhi semangat dan komitmen individu untuk melaksanakan kebijakan. Motivasi yang baik akan meningkatkan produktivitas, konsistensi, dan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan program ASKIA CERIA. Berikut adalah langkah operasionalnya.

1. Penguatan Motivasi Intrinsik

Tindakan: Berikan pemahaman kepada petugas bahwa program ASKIA CERIA memiliki manfaat besar bagi masyarakat, seperti mempermudah akses administrasi kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan. Libatkan petugas dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Ciptakan suasana kerja yang mendukung, seperti memberikan apresiasi verbal atas kerja keras dan kontribusi petugas.

Indikator Operasional: Jumlah sesi motivasi atau diskusi kelompok untuk memperkuat semangat petugas dan tingkat kepuasan kerja berdasarkan wawancara.

2. Pemberian Insentif Ekstrinsik

Tindakan: Sediakan insentif finansial bagi petugas yang mencapai target tertentu, seperti honor tambahan bagi petugas jemput bola di daerah terpencil.

Indikator operasional: Jumlah insentif atau penghargaan yang diberikan setiap bulan.

- c. Komitmen dalam disposisi mencerminkan sejauh mana pihak-pihak

yang terlibat dalam pelaksanaan program ASKIA CERIA memiliki dedikasi dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan kebijakan. Tingkat komitmen yang tinggi memastikan program berjalan sesuai rencana, meskipun menghadapi hambatan. Berikut adalah langkah operasional untuk meningkatkan dan mengukur komitmen:

1. Penetapan Target dan Tanggung Jawab

Tindakan: Tetapkan target yang jelas dan terukur untuk setiap petugas, seperti jumlah anak yang harus didaftarkan untuk KIA di wilayah tertentu serta distribusikan tugas secara spesifik kepada setiap unit atau individu, misalnya petugas kecamatan bertanggung jawab memastikan sosialisasi berjalan sesuai panduan.

Indikator operasional: Tingkat pemenuhan target berdasarkan laporan bulanan dan jumlah petugas yang menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu.

4. Aspek Struktur Birokrasi

Aspek birokrasi merujuk pada struktur, prosedur, dan mekanisme yang ada dalam birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan.

Selanjutnya operasionalisasi dari aspek struktur birokrasi ini adalah:

- a. Struktur Hierarki, yaitu Struktur hierarki dalam birokrasi merujuk pada tata kelola organisasi yang menunjukkan alur kewenangan, tanggung jawab, dan komunikasi dari tingkat atas ke bawah. Dalam menjalankan program ASKIA CERIA, struktur hierarki yang jelas memastikan kelancaran koordinasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas di setiap

tingkatan organisasi. Berikut adalah langkah operasionalnya:

1. Penetapan Jalur Koordinasi yang Jelas

Tindakan: Identifikasi dan tetapkan alur kewenangan dari kepala Dinas Dukcapil, koordinator kecamatan, hingga petugas lapangan.

Indikator operasional: Tersedianya panduan struktur organisasi dan alur koordinasi.

2. Penunjukan Koordinator di Setiap Tingkatan

Tindakan: Tunjuk koordinator di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab atas implementasi program ASKIA CERIA di wilayah masing-masing.

Indikator operasional: Jumlah koordinator yang ditunjuk dan dilatih.

- b. Prosedur dan operasional dalam struktur birokrasi merujuk pada serangkaian aturan, panduan, dan langkah-langkah sistematis yang harus diikuti untuk menjalankan program ASKIA CERIA secara efisien. Prosedur yang terstandar membantu mengurangi kesalahan, meningkatkan kecepatan pelayanan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan.

1. Penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP)

Tindakan: Susun SOP yang mengatur langkah-langkah penerbitan KIA, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dokumen, hingga pencetakan dan distribusi.

Indikator operasional: Tersedianya dokumen SOP yang disahkan oleh

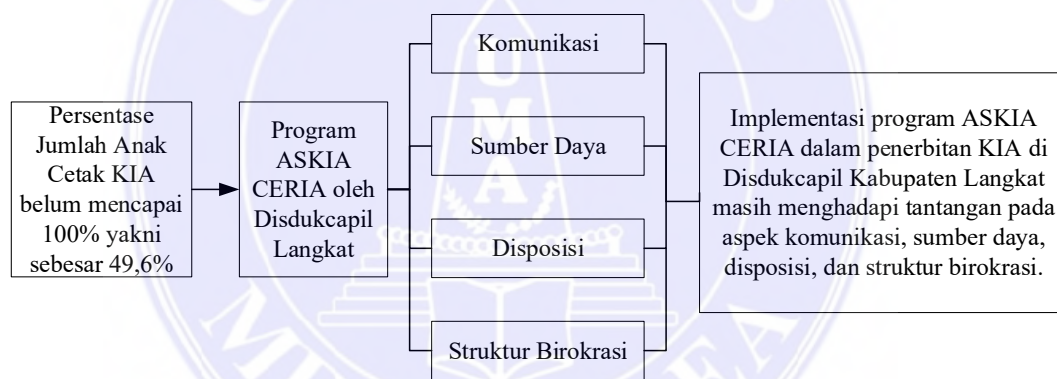
Dinas Dukcapil.

2. Pemantauan dan Evaluasi Prosedur

Tindakan: Lakukan audit internal secara berkala untuk memastikan SOP diikuti dengan konsisten dan Evaluasi efektivitas prosedur dengan mengumpulkan masukan dari petugas dan masyarakat.

Indikator operasional: Jumlah audit yang dilakukan dalam setahun dan Jumlah perubahan atau perbaikan prosedur berdasarkan evaluasi.

Berdasarkan definisi dan operasionalisasi aspek penelitian diatas, maka dapatlah digambarkan kerangka berpikir penelitian, seperti Gambar 2.1:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 dan mengambil tempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

3.2. Jenis dan Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman dan penggambaran fenomena sosial atau perilaku manusia dalam konteksnya yang alami, dengan tujuan untuk memberikan deskripsi yang mendetail dan mendalam. Oleh karena itu jenis penelitian ini akan membantu memberikan pemahaman mendalam, menggali perspektif pelaksana untuk dapat memberikan solusi terbaik dari permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang berfungsi sebagai key informan. Proses wawancara ini akan berpedoman pada panduan yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan yang

diajukan kepada informan akan bersifat terbuka dan fleksibel, disesuaikan dengan dinamika yang terjadi selama wawancara untuk menggali informasi tentang persepsi, pola, serta pendapat-pendapat dari para informan. Jika informasi yang diperoleh sudah cukup memenuhi tujuan penelitian, maka proses pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Adapun secara garis besar peneliti akan mewawancarai informan terkait aspek komunikasi, sumberdaya disposisi, dan struktur birokrasi pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Langkat. Butir pertanyaan pokok tersebut akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung sehingga informan memberikan jawaban secara mendalam. Adapun informan yang akan ditanyakan yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, Kepala Bidang pelayanan pendaftaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, mitra usaha yang terdaftar dalam kerjasama serta orang tua anak.

2. Studi Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi pembuatan Kartu Identitas Anak. Seperti buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

3. Observasi Terstruktur

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan yang melibatkan pengumpulan informasi melalui observasi langsung terhadap subjek yang sedang diteliti untuk memperoleh data yang berkaitan. Adapun tipe observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur dengan

menggunakan panduan atau instrumen khusus yang telah dirancang terhadap aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Langkat yang dilaksanakan oleh Disdukcapil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kenyataan dan fakta sosial yang ada, sehingga hasil wawancara atau informasi dari para informan dapat dibandingkan dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Proses pengolahan data melibatkan beberapa tahap, mulai dari perolehan data, reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam tahap awal, data yang terkumpul berupa deskripsi dan penjelasan diorganisasikan dan disederhanakan melalui proses reduksi. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menyusun sajian data dalam bentuk narasi yang sistematis. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan yang divalidasi berdasarkan semua informasi yang ada dalam reduksi dan sajian data tersebut. Jika kesimpulan yang dihasilkan terasa kurang kuat, proses penggalan data akan dilakukan kembali. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan hingga kesimpulan yang diperoleh dinilai cukup memadai untuk menggambarkan dan menjawab fokus penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman, analisis data adalah :

Proses pengorganisasian dan pengelompokan data ke dalam pola, kategori, dan unit penjelasan dasar. Hal ini bertujuan untuk menemukan tema-tema yang relevan serta merumuskan hipotesis kerja yang didasarkan pada informasi yang diperoleh. Dengan demikian, data yang terkumpul melalui wawancara serta studi pustaka atau dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk memahami maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian yang

sedang diteliti. Data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk narasi serta kutipan langsung dari hasil wawancara.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tahap analisis data yang diutarakan oleh Sarantakos dalam karya Alston dan Bowles (1998:195). Tahap-tahap tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori umum, yaitu: pengurangan data (data reduction), pengorganisasian data (data organization), dan interpretasi (interpretation). Masing-masing tahap tersebut akan dijelaskan secara lebih spesifik berikut ini:

- a. *Data reduction* (reduksi data), mereduksi data merupakan proses awal di mana data yang telah dikumpulkan disederhanakan, difokuskan, dan diklasifikasikan untuk memastikan relevansinya dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, data yang tidak relevan atau berlebihan dieliminasi, sementara data yang penting dikelompokkan ke dalam kategori atau tema tertentu. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah analisis dengan memastikan hanya data yang signifikan yang digunakan. Reduksi data tersebut nantinya merangkum aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi pembuatan Kartu Identitas Anak.
- b. *Data organization* (pengbirokrasian data), proses ini melibatkan penataan data secara sistematis agar lebih terstruktur, seperti dalam bentuk tabel, matriks, atau diagram. Pengorganisasian juga mencakup pengkodean data untuk mempermudah analisis lebih lanjut serta penyusunan data berdasarkan kategori atau variabel yang relevan. Dengan cara ini, pola, hubungan, atau tren yang muncul dari data menjadi lebih mudah dikenali. Pada tahap ini data-data aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan

struktur birokrasi pembuatan Kartu Identitas Anak yang hampir sama atau mirip digabungkan dalam kategori tertentu untuk dijadikan dalam bentuk satu permasalahan saja.

- c. *Interpretation* (interpretasi atau penafsiran), Proses memberikan makna pada data yang telah diorganisasi untuk menarik kesimpulan dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian terhadap aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pembuatan Kartu Identitas Anak. Ini dimaksudkan untuk membawa kepada simpulan yang telah teruji melalui data yang benar-benar lengkap dan tidak ada informasi atau pengertian baru yang terlewatkan.

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengelola, menyusun, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikan data yang telah diperoleh. Penulis menggunakan teknik analisis taksonomis (*taxonomic analysis*) untuk menggali tema atau permasalahan secara lebih mendalam dan terperinci. Pendekatan ini menitikberatkan pembahasan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam proses penerbitan Kartu Identitas Anak. Meskipun fokusnya diarahkan pada bidang tertentu, fenomena yang menjadi inti masalah dijelaskan secara mendalam. Dengan demikian, domain yang menjadi perhatian utama perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami struktur internalnya secara detail (Faisal, 1990:98).

Ada tiga strategi yang digunakan dalam mengembangkan teori, yaitu : (1) menulis catatan atau *note writing*, (2) mengidentifikasi konsep-konsep atau *discovery or identification of concepts*, dan (3) mengembangkan batasan konsep

dan teori atau *development of concept definition and the elaborate of theory* (ibid, 109).

1. Menulis Catatan (*Note Writing*)

Strategi ini melibatkan pencatatan ide, pengamatan, atau refleksi yang muncul selama proses penelitian. Catatan ini berfungsi sebagai dasar untuk mengorganisasi pemikiran, mendokumentasikan temuan, dan mengembangkan wawasan awal. Melalui penulisan catatan, peneliti dapat mengidentifikasi pola atau hubungan yang relevan dengan topik penelitian.

2. Mengidentifikasi Konsep (*Discovery or Identification of Concepts*)

Pada tahap ini, peneliti berfokus pada penemuan konsep-konsep utama yang muncul dari data. Konsep-konsep tersebut adalah elemen-elemen kunci yang membantu menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Proses ini melibatkan analisis mendalam untuk mengungkap makna dan signifikansi dari konsep-konsep tersebut dalam konteks penelitian.

3. Mengembangkan Batasan Konsep dan Teori (*Development of Concept Definition and the Elaborate of Theory*)

Strategi ini bertujuan untuk memperjelas definisi konsep dan mengembangkan teori berdasarkan hubungan antar-konsep yang telah diidentifikasi. Peneliti menetapkan batasan-batasan konseptual, memperinci makna konsep, dan menghubungkannya secara sistematis untuk membentuk kerangka teori yang kokoh. Tahap ini merupakan proses sintesis di mana peneliti mengintegrasikan temuan-temuan menjadi penjelasan teoritis yang komprehensif.

Ketiga strategi ini saling berkaitan dan membentuk dasar bagi pengembangan teori yang valid, relevan, dan mendalam.

Mengacu pada konsep teknik analisis taksonomi, penelitian ini hanya mencapai tahap penemuan atau identifikasi konsep-konsep yang berkaitan dengan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak. Penelitian ini belum sampai pada tahap pembentukan teori karena adanya keterbatasan dari pihak penulis, terutama terkait dengan biaya penelitian dan waktu yang relatif singkat untuk mengungkap fenomena secara mendalam dalam pendekatan kualitatif.

Dalam analisis data, penulis mengadopsi pendekatan fenomenologis, yang berfokus pada upaya memahami makna suatu peristiwa berdasarkan pengalaman subjektif individu dalam menginterpretasikan suatu permasalahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program ASKIA CERIA dalam penerbitan KIA di Disdukcapil Kabupaten Langkat masih menghadapi tantangan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini dapat dilihat pada masing-masing aspek sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam program ASKIA CERIA masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek penyampaian informasi yang belum optimal, kejelasan pesan yang masih perlu ditingkatkan, serta konsistensi antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya tercermin dalam implementasi di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh dan pelaksanaan program yang efektif.
2. Pelaksanaan program ASKIA CERIA di Kabupaten Langkat masih menghadapi tantangan pada aspek sumber daya, khususnya terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, keterbatasan fasilitas promosi di luar instansi, serta belum tersedianya alokasi anggaran khusus yang berdampak pada optimalisasi kegiatan sosialisasi dan dukungan kepada mitra usaha.
3. Disposisi pelaksana program ASKIA CERIA menunjukkan penerimaan dan komitmen yang tinggi dari petugas Dukcapil, didukung oleh pemahaman manfaat program dan motivasi yang kuat meskipun terbebani

tugas tambahan. Namun, rendahnya penerimaan dan komitmen dari mitra usaha menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan insentif.

4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program ASKIA CERIA masih menghadapi kendala pada koordinasi antara pusat dan daerah, serta belum adanya mekanisme evaluasi yang terstruktur terhadap kemitraan dengan pelaku usaha. Selain itu, kurangnya arahan dan tindak lanjut yang jelas terhadap mitra eksternal menandakan perlunya penyempurnaan prosedur agar lebih sistematis, fleksibel, dan adaptif dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

5.2. Saran

Berdasarkan penjabaran kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran untuk meningkatkan implementasi program ASKIA CERIA dalam penerbitan KIA sebagai berikut.

1. Mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi yang telah digunakan dalam sosialisasi kebijakan ASKIA CERIA, termasuk pemanfaatan media digital, peran petugas kecamatan, dan keterlibatan pelaku usaha.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin yang terarah dan berkelanjutan serta pengembangan keterampilan dan mendorong kolaborasi, sehingga setiap staf memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara optimal.
3. Mengeksplorasi cara-cara efektif dalam mengoptimalkan fasilitas yang ada, serta merancang mekanisme pendanaan yang dapat mendukung pelaksanaan dengan lebih maksimal.

4. Memperkuat koordinator lintas sektor dengan pelaku usaha melalui pendekatan yang lebih personal dan insentif yang saling menguntungkan, serta terus meningkatkan motivasi melalui pelatihan dan penghargaan bagi petugas pelaksana.
5. Meningkatkan efektivitas prosedur dan standar operasional yang lebih adaptif sesuai kebutuhan dengan memperkenalkan mekanisme tindak lanjut yang jelas dan terukur bagi pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Alya. (2023). Implementasi Program “Pelana Sidian” dalam Penerbitan Karti Identitas Anak di Kabupaten Bireuen Prov. Aceh. *IPDN*.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 2(1), 17–37.
<https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37>
- Ball, R. (1976). A dependency model of mass-media effects. *Communication Research*, 3(1), 3–21.
- Deto, A., Putra, R., & Mada, U. G. (2024). " Unraveling the Red Thread of Strategic Communication " Concept , Theories , " Unraveling the Red Thread of Strategic Communication " Concept , Theories , Research , and Evaluation. November 2023. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16076.22408>
- Djatnika, A. (2023). INOVASI PELAYANAN THREE IN ONE DALAM PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CILACAP. *Diss. IPDN*.
- Dr. Sobirin, S. S. M. S. (2023). *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori dan Aplikasinya)*. CHAKTI PUSTAKA INDONESIA.
<https://books.google.co.id/books?id=m0TrEAAAQBAJ>
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press. <https://books.google.co.id/books?id=psY-NwAACAAJ>
- Edwards, G. C. (1980). Implementing public policy. In *Politics and public policy series TA - TT -*. Congressional Quarterly Press. <https://doi.org/> LK -

<https://worldcat.org/title/6487601>

Festinger. (1957). *A theory of cognitive dissonance* (Evanston,). Peterson.

Garashi, H. Y., Steinke, D. T., & Schafheutle, E. I. (2021). A qualitative exploration of pharmacovigilance policy implementation in Jordan, Oman, and Kuwait using Matland's ambiguity-conflict model. *Globalization and Health*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00751-y>

Hasibuan, Y. A., Sinaga, R. S., & Adam, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. *Perspektif*, 11(2), 394–406. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5680>

Jamaluddin, Y. (2016). Model Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam (TAPIS)*, 12(1), 55–68. public service

Jensen, C., Johansson, S., & Löfström, M. (2018). Policy implementation in the era of accelerating projectification: Synthesizing Matland's conflict–ambiguity model and research on temporary organizations. *Public Policy and Administration*, 33(4), 447–465. <https://doi.org/10.1177/0952076717702957>

Kodariah, N. N. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Kota Bekasi. *Skripsi*, 1–287. <http://repository.unitomo.ac.id/849/1/317-1460-1-PB.pdf>

Ningtyas, P. C., & Umiyati, S. (2023). Inovasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Program Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan Dispendukcapil Kota Surabaya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(5), 4382–4396.

- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). in *Granting Youth Service in West Sumatera*. 236–242.
- Ramdhani. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
- Sholeh, N. R. M., Muchsin, S., & Anadza, H. (2021). Implementasi Model Richard Mathland Dalam Kebijakan Home Learning di Kondisi Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo). *Respon Publik*, 15(9), 66–73.
<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657%0Ahttps://www.neliti.com/id/publications/1168/>
- Sormin, R. D. (2021). The Effect of Communication, Resources, Disposition And Structure of Bureaucracy on Medical Participation of Men's Operations in City of Bandar Lampung (Study of George Edward III Policy Implementation Model). *International Journal for Innovation Education and Research*, 9(7), 323–338. <https://doi.org/10.31686/ijer.vol9.iss7.3254>
- Suciana. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten bekasi dalam pengentasan kemiskinan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(7), 318–327.
- Sugiharti. (2008). TEC empresarial. *TEC Empresarial*, 18(2), ág. 769-775.
https://revistas.tec-ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/295/175
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komperatif*. Yogyakarta: CAPS



Lampiran 1. SK Bupati Langkat



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 470 - 05 / K / 2023

TENTANG
INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN LANGKAT

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta tertib Administrasi Kependudukan kepada masyarakat di Kabupaten Langkat, perlu dilakukan inovasi dalam pemberian layanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Langkat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6579);

Lampiran 1. SK Bupati Langkat (Lanjutan)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN :

KESATU

1. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Langkat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Lampiran 1. SK Bupati Langkat (Lanjutan)

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat pada setiap tahun anggarannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 30.1.2023

Pt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI

SYAH AFANDIN



Lampiran 1. SK Bupati Langkat (Lanjutan)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 470-05/K/2023

Tanggal : 31-1-2023

Tentang : Inovasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten
Langkat

No	Inovasi Pelayanan	Keterangan
1	SPANDUK (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi Kecamatan)	Layanan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan berbasis Kecamatan
2	MOLIN (Mobil Layanan Keliling)	Layanan Keliling / Jemput bola layanan Administrasi Kependudukan ke Desa/Kelurahan
3	ALDA KITA (Anak Lahir dapat KK, KIA dan Akta)	Kerjasama dengan Rumah Sakit/Klinik bersalin/fasilitas kesehatan lainnya dalam penerbitan dokumen kependudukan pasien yang melahirkan
4	SI UDANG GALAH (Siap Urus Dokumen Langsung Warga yang mengalami Musibah)	Layanan Penerbitan dokumen kependudukan bagi warga yang mengalami musibah
5	PASTI BERKAH (Pasangan telah menikah diberikan KK, KTP, Akta Kawin dan Buku Nikah)	Kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kab. Langkat dalam penerbitan dokumen kependudukan pasangan pengantin
6	KADOKU 17 (KTP diperoleh saat usiaku 17 Tahun)	Layanan penerbitan KTP elektronik bagi wajib KTP pemula
7	LAYAK PANDU (Layanan Akta Kematian Penduduk Meninggal Dunia)	Layanan penerbitan akta kematian berbasis Petugas di Kecamatan
8	RATU PATI (Urus Satu Dapat Tiga)	Kerjasama dengan HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini) Kab. Langkat dalam menerbitkan KK, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)
9	LAPAK ONLINE (Layanan Whatsapp Administrasi Kependudukan Online)	Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan melalui aplikasi online Whatsapp (WA)
10	DENTING (Dukcapil Peduli Stunting)	Layanan Penerbitan dokumen kependudukan bagi anak yang mengalami stunting

Lampiran 1. SK Bupati Langkat (Lanjutan)

No	Inovasi Layanan	Keterangan
11	PERAN PAK LUKMAN SIDIK (Percepatan Penerbitan Akta Kematian melalui Buku Pokok Pemakaman terintegrasi Desa/Kelurahan)	Penerbitan akta kematian berbasis buku pokok pemakaman bagi petugas pemakaman di Desa /Kelurahan
12	NANTI KU TUNTASKAN (Pelayanan Tim Khusus untuk Disabilitas Kabupaten Langkat)	Layanan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk disabilitas dan lansia
13	SIFOKAD (Sistem Informasi Kearsipan Digital)	Layanan arsip digital dokumen kependudukan
14	ASKIA CERIA (Ayo segera Miliki Kartu Identitas Anak, Cepat rasakan manfaatnya)	Kerjasama dengan mitra usaha dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA)

PIL. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI

SYAH AFANDIN

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian (Lanjutan)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)22/8/25